



PARLEMENTARIA DPRD KOTA JOGJA

Laporan Pelaksanaan Pertanggungjawaban APBD 2021 Kota Jogja

# Segera Manfaatkan Silpa, Eman-Eman Dikembalikan ke Kas Daerah

DPRD Kota Jogja mendorong Pemkot Jogja secepatnya memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran (Silpa) Tahun Anggaran (TA) 2021. Sebab, sebanyak 13 persen anggaran tahun lalu belum sepenuhnya terserap. Karena itu, Ketua DPRD Kota Jogja Danang Rudyatmoko mendorong agar perencanaan dan target APBD Kota Jogja diadakan penyesuaian.

**TERLEBIH**, pendapatan Kota Jogja mencapai 104,65 persen. Atau 4,65 persen melebihi target. Realisasinya mencapai Rp 1,7 triliun. Sedangkan belanja APBD TA 2021 baru mencapai 87 persen. A Rp 1,69 triliun.

"Target pendapatan seperti ini fantastis. Tapi Silpa 13 persen ini, apa iya. Mestinya dalam perencanaan, target pendapatan lebih tinggi lagi," ujar Danang kemarin (26/6).

Sebelumnya, usai mengikuti rapat paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2021, Danang meminta agar Silpa segera dimanfaatkan. Tidak dikembalikan ke kas daerah. "Kalau tidak dimanfaatkan, *eman-eman*," tegasnya.

Karena itu, dewan mendorong segera melakukan evaluasi terhadap serapan anggaran di semester satu TA 2022. Sekiranya ada kegiatan yang belum sempat teranggarkan, dapat



**EVALUASI:** DPRD Kota Jogja menggelar paripurna dengan agenda mendengarkan pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 Kota Jogja. Realisasi pendapatan mencapai 104 persen dari target.

segera memanfaatkan Silpa. "Kalau Silpa tidak dimanfaatkan, otomatis kembali ke kas daerah. Kalau kembali, artinya rugi. Punya *duit* tidak bisa memanfaatkan," lontarnya.

Danang menargetkan, peraturan daerah (raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2021 rampung dibahas dan diparipurkan pada 15 Juli mendatang.

**Target pendapatan seperti ini fantastis. Tapi Silpa 13 persen ini, apa iya. Mestinya dalam perencanaan, target pendapatan lebih tinggi lagi."**

**DANANG RUDYATMOKO**  
Ketua DPRD Kota Jogja

Setelah itu, DPRD bersama Pemkot Kota Jogja harus segera menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) TA 2023. "Jadi menyambung terus," cetusnya.

Selanjutnya, Danang mengapresiasi, Pemkot Kota Jogja 13 kali berturut-turut memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan



Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Namun demikian, dewan baka menjalankan fungsi pengawasan. "Terkait Silpa yang besar akan menjadi perhatian. Harapan kami, Silpa tidak

lebih dari 10 persen APBD yang dianggarkan," ucapnya. Danang juga menyinggung program tidak berjalan di Pemkot Jogja. Dikatakan, beberapa fraksi di DPRD Kota Jogja mengkritisi penanganan di masa pandemi Covid-19. Sebab masih ditemukan kelangkaan oksigen pada 2021.

"Sementara dari sisi perencanaan belanja, sudah ada anggaran untuk pencegahan itu sekitar Rp 1,3 miliar. Ini menjadi perhatian kami," ungkap Danang.

Menanggapi pemandangan umum fraksi-fraksi, Penjabat Wali Kota Jogja Sumardi bakal menjawabnya pada sidang paripurna pada Kamis 1 Juli mendatang. Semua pandangan fraksi-fraksi itu tengah ditampung. "Nanti kami jawab," tegasnya.

BPK Perwakilan DIY telah melaksanakan audit terhadap laporan keuangan Pemkot Jogja TA 2021. Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan Nomor 02a/lhp/18yog/03/2022 tanggal 8 Maret 2022. Hasil pemeriksaan meliputi posisi keuangan Pemkot Jogja sampai tanggal 31 Desember 2021. Kemudian realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, dan perubahan ekuitas. (**fat/kus/zi**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005